

Diskusi KPK

Gratifikasi: Virus Peluluh Karakter Bangsa,
Analisis untuk Solusi

Muh. Busyro Muqoddas
Dosen FH UII & Advokat HAM

Kamis, 4 Juni 2026

I. Pengantar

Rata-rata kejahatan korupsi yang datanya ditemukan di KPK Independen (UU No. 30 Tahun 2002) membuktikan 70% jenis virus kanker pembunuh integritas pejabat penyelenggara negara dan pihak terkait lainnya adalah “suap/gratifikasi”.

Tidak perlu ditafsir lain kecuali bahwa “**korupsi sebagai *crime against humanity***” telah cukup kuat terbukti sebagai virus pembunuh individual dan kolektif yang berada dalam pusat kekuasaan kenegaraan.

Korban utamanya **rakyat dan kemanusiaan autentik/fitrah**. Dampak dari itu terkikisnya **muru’ah birokrasi, kepemimpinan politik, dan demoralisasi rakyat** sebagai sumber daya insani masa depan serta pesatnya sikap karakter hidup pragmatis hedonis machiavalistik

II. Esensi Problem Politik Gratifikasi

1. Gratifikasi yang terlarang dari doktrin agama, etika dan moral religius tidak menjadi faktor penting oleh birokrasi pemerintah dan DPR. Semakin masifnya praktek *suap/money politic* termasuk gratifikasi semakin memperkuat terbentuknya **birokrasi kenegaraan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)**.

Data NKKRI di bawah menegaskan adanya korelasi antara praktek tuna etik proses pemilu dan pilkada yang memproduksi pejabat birokrasi skala nasional terlibat korupsi sebagai **kejahatan politik** peremuk moralitas bangsa



DATA KORUPSI NKKRI 2004-2022 (PRODUK PEMILU PILKADA TRANSAKSIONAL)

Lanjutan

2. Praktek gratifikasi telah memproduksi birokrat birokrasi kenegaraan memasifkan tingkat kefakir-miskinan rakyat dengan sejumlah besar program dan gerakan masif kulturasi “**mental lebih nyaman menerima**”. Mentalitas demikian memperkuat budaya “**klientalisme**” yang semakin subur dalam iklim budaya politik nasional feodalisme. Korupsi di tahun sebelum tahun 2014 menemukan analisis Klieckgaard (ahli manajemen terkemuka AS), kejahatan korupsi di NRI mencerminkan rumus **$C=D+M-A$** . Apalagi sejumlah anggota DPR terlibat laku kumuh dan DPR pernah bersikap “**subversif**” terhadap KPK

Lanjutan

Namun kini pengamatan sosilogis antropologis dari kalangan aktivis CSO menemukan dinamiknya, yakni $C=D+M-A$ di atas, telah berubah cepat kilat menjadi $C=D+DPN+M-A$. Korupsi bersumber dari **diskresi dinasti politik nepotisme** diperkuat dengan model **monopoli** dan **tandus akuntabilitas**

Lanjutan

3. Sikap DPR bersama elite parpol tidak mungkin dilepaskan dari “**TSM Gratifikasi**”, terstruktur sistemik dan masifnya gratifikasi. Sumber politik utamanya: UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada dan Kekumuhan KPU dalam praktek pemilu selama 2004 sd 2024. Analisis sosiologis antropologis selain bersumber dari faktor politik, juga berbasis pada faktor “**Feodalisme**” dan “**Bapakisme**” ke dalam ruang-ruang politik secara masif. Juga statisnya dinamika pemahaman ulama tentang aspek penting “akhlak politik”. Ada problem seputar doktrin fikih gratifikasi dikalangan umat Islam dengan sejumlah sebab tertentu

III. Integrasi Peran Agama dalam Politik Kontemporer tentang Gratifikasi Menuju Solusi

1. Menguatnya arus paradigma budaya pemikiran Islam Fikih dari pada Islam Profetik berbasis pada pemikiran dan gerakan **“pemerdekaan, kemanusiaan dan transendental”** (Islam berbasis pilar liberasi, humanisasi, dan transendensi). Saatnya untuk segera mengembangkan **spirit doktrin profetik dalam wacana Islam, Gratifikasi dan KPK** (Semoga Presiden Prabowo membuktikan kejujurannya untuk menerbitkan Perppu kembali ke UU KPK No. 30 Tahun 2002, hal itu juga menjadi keputusan Tanwir Muhammadiyah Kupang Tahun 2004)

Lanjutan

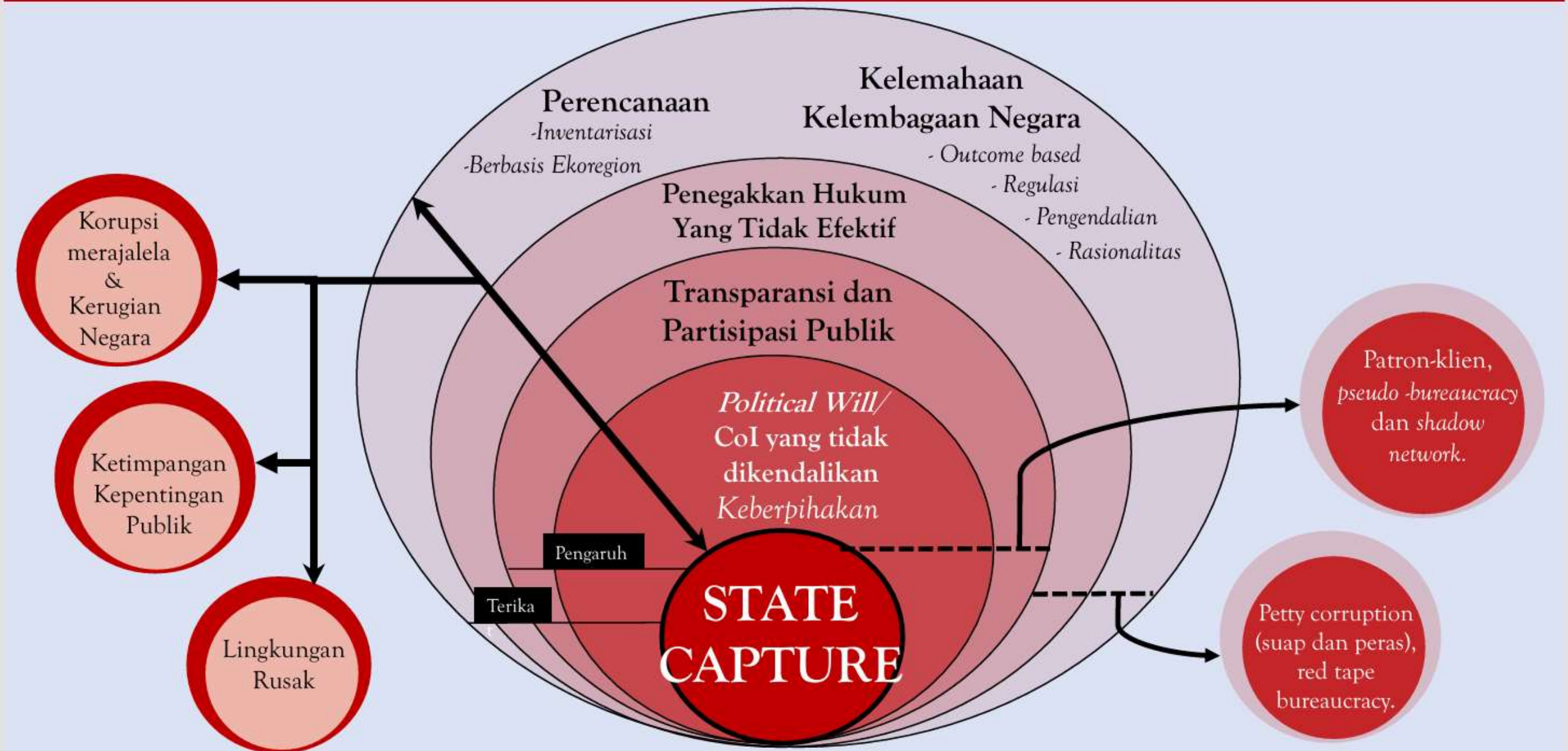
Ormas keislaman dan sejumlah besar pesantren dan perguruan tingginya mendesak untuk menggelar program riset praktek dan dampak gratifikasi terhadap krisis integritas negara dan **kemiskinan politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, HAM dan keamanan ketahanan** (Kemiskinan Poleksosbudkumhamkamhan)

2. Hasil riset oleh KPK bersama Ormas Islam, menjadi basic untuk seminar nasional tentang Peran dan Tanggungjawab Ormas Agama, Perguruan Tinggi, Aktivis Mahasiswa, MUI, KPK, DPR, Menkum, Korporasi dan NGO. Target seminar yaitu mengidentifikasi kausalitas budaya feodalisme terhadap gratifikasi serta penemuan **“ayat-ayat satanic pasal-pasal UU terkait Gratifikasi”**. Tujuannya untuk memperluas Gerakan Pemberantasan Gratifikasi berbasis Kekuatan Integrasi Ormas Agama dan elemen Masyarakat Sipil bersama KPK

3. Sebagai rekomendasi ideologis (mengenangi KPK Independen lalu), **concern KPK periode tahun 2024-2029** menunjukkan kepekaan terhadap praktek gratifikasi yang semakin meluas diberbagai sektor dan lini yang semakin mengancam perlindungan masa depan bangsa terutama generasi penerus bangsa, perlu dirumuskan RTL seminar/diskusi ini.

Antara lain: a) **ada tim Ad hoc** untuk memperluas hasil seminar ke berbagai stakeholder skala nasional, b) **menyusun buku atau proceeding** tentang follow up seminar/diskusi ini bersama KPK dengan Civitas Akademika Perguruan Tinggi

MIND-MAP AKAR PERMASALAHAN PSDA



Penutup

**KEJAHATAN YANG TERORGANISIR AKAN
MELINDAS KEBENARAN YANG TERPENCAR**